

Analisis Determinan Kemiskinan di 15 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2023

Analysis Of Poverty Determinants in 15 Provinces in Indonesia 2015-2023

Jihan Hasna Dzakiyyah^{a*}, Yuni Prihadi Utomo^b

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{a,b}

^ab300210110@student.ums.ac.id, ^byp196@ums.ac.id

Disubmit : 28 April 2025, Diterima : 20 Mei 2025, Dipublikasi : 30 Mei 2025

Abstract

This research aims to determine the direction and magnitude of the influence of government spending, the proportion of informal sector workers, regional minimum wages, the proportion of GRDP in the agricultural sector, population density, and access to basic services in 15 provinces in Indonesia during the period 2015-2023. This type of research is quantitative research using secondary data. The data analysis technique used is panel data regression analysis with the Random Effect Model (REM) estimated model. The research results show that government spending, the proportion of informal sector workers, the proportion of GRDP in the agricultural sector have a positive effect on poverty in 15 provinces in Indonesia. Meanwhile, the Regional Minimum Wage, population density and access to basic services have a negative effect on poverty in 15 provinces in Indonesia.

Keywords: *Poverty, Government Expenditure, Informal Sector Workers, Regional Minimum Wage, Agricultural Sector, Population Density, Access To Basic Services.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah, proporsi pekerja sektor informal, upah minimum regional, proporsi PDRB sektor pertanian, kepadatan penduduk, dan akses pelayanan dasar pada 15 provinsi di Indonesia selama kurun waktu 2015-2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model estimasi Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, proporsi pekerja sektor informal, proporsi PDRB sektor pertanian berpengaruh positif terhadap kemiskinan di 15 provinsi di Indonesia. Sedangkan Upah Minimum Regional, kepadatan penduduk dan akses pelayanan dasar berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 15 provinsi di Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Pekerja Sektor Informal, Upah Minimum Regional, PDB, Sektor Pertanian, Kepadatan Penduduk, Akses Terhadap Layanan Dasar.

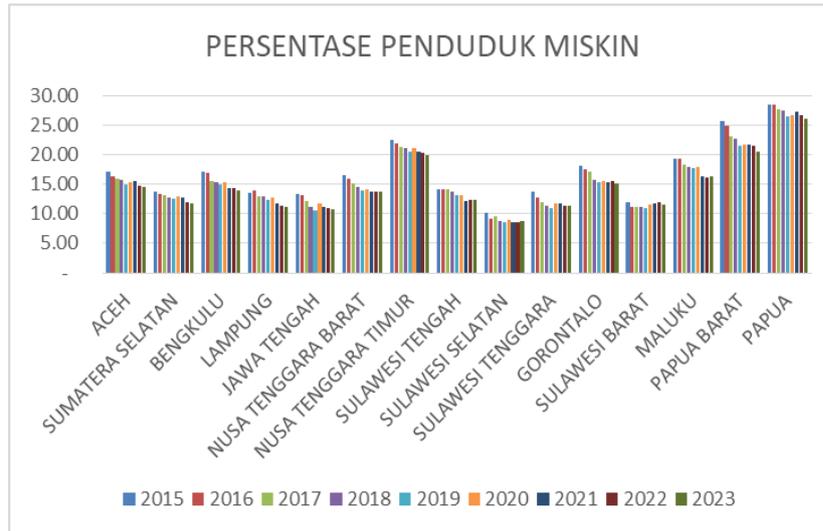
1. Pendahuluan

Suatu pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di suatu negara yang salah satu indikator keberhasilannya diukur dengan tingkat kemiskinan (Sholikhah et al., 2022). Kemiskinan merupakan isu multidimensional yang secara umum menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan diawali ketika masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dan dianggap tingkat kemakmuran masih dibawah standar hidup tertentu (Amalia & Utomo, 2023). Tingkat dan karakteristik kemiskinan bervariasi antar wilayah, meskipun angka kemiskinan secara nasional menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kemiskinan di setiap provinsi Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan dalam

kondisi ekonomi, sosial, demografis, serta geografis. Oleh karena itu, penting untuk memahami komponen khusus yang memengaruhi kemiskinan di tingkat regional.

Berdasarkan data BPS pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 20,62 juta jiwa (7,49% dari total penduduk). Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan tertinggi diduduki provinsi Papua dengan persentase 26,03%, Papua Barat berada di posisi kedua dengan persentase 20,49%, disusul Nusa Tenggara Timur dengan persentase 19,96%, dan Maluku dengan persentase 16,42%. Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Secara umum, tren kemiskinan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Namun, tingkat penurunan dan kondisi yang spesifik di setiap provinsi berbeda. Berdasarkan data BPS di provinsi Aceh pada tahun 2014 persentase kemiskinan 19,98% mengalami penurunan pada tahun 2023 persentase kemiskinan menjadi 14,45%. Sumatera Selatan pada tahun 2014 dengan persentase tingkat kemiskinan 13,62% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 11,78%. Bengkulu pada tahun 2014 dengan persentase kemiskinan 17,09% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 14,04%. Lampung pada tahun 2014 dengan persentase kemiskinan 14,21% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 11,11%. Jawa Tengah pada tahun 2014 dengan persentase kemiskinan 13,58% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 10,77%. Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 dengan persentase kemiskinan 17,05% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 13,85%. Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014 dengan persentase kemiskinan 19,60% mengalami kenaikan tahun 2023 persentase kemiskinan naik menjadi 19,96%. Sulawesi Tengah pada tahun 2014 dengan persentase kemiskinan 13,61% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 12,41%. Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 dengan persentase kemiskinan 12,77% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 11,43%. Gorontalo pada tahun 2014 dengan persentase kemiskinan 17,41% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 15,15%. Sulawesi Barat pada tahun 2014 dengan persentase kemiskinan 12,05% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 11,49%. Maluku pada tahun 2014 dengan persentase kemiskinan 18,44% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 16,42%. Papua Barat pada tahun 2014 dengan persentase kemiskinan 26,26% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 20,49%. Papua pada tahun 2014 dengan persentase kemiskinan 27,80% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 26,03%.



Grafik 1.

Persentase Penduduk Miskin 15 Provinsi Tahun 2015-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dari Grafik 1 menunjukkan tingkat kemiskinan di 15 Provinsi selama periode 2015-2023. Dari 15 provinsi tersebut terdapat tiga provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi , yaitu Papua dengan persentase 26,03%, Papua Barat dengan persentase 20,49%, dan Nusa Tenggara Timur dengan persentase 19,96%. Tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu, Sulawesi Selatan dengan persentase 8,7%, Jawa Tengah dengan persentase 10,77%, dan Lampung dengan persentase 11,11%. Perbedaan tingkat kemiskinan di setiap provinsi menunjukkan seberapa besar masalah dan seberapa banyak yang perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Malthus menjelaskan bahwa suatu saat pertumbuhan penduduk akan melebihi persediaan bahan makanan yang ada. Ketika keadaan ini terjadi, maka akan mengakibatkan jumlah bahan makanan menjadi terbatas. Penduduk yang berpendapatan rendah yang tidak mendapatkan bahan makanan akan menjadi miskin (Chairunnisa & Qintharah, 2022). Namun, teori ini dikritik oleh Teori Transisi Demografi (*Demographic Transition Theory* - Notestein, 1945), yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi pada tahap awal pembangunan akan berkurang dengan meningkatnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

Teori kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1999) yang menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya kurangnya pendapatan, tetapi juga ketidakmampuan seseorang untuk mengakses peluang yang memungkinkan mereka berkembang. Menurut Sen, seseorang dianggap miskin jika mereka tidak memiliki kebebasan untuk memilih kehidupan yang mereka nilai berharga. Oleh karena itu, kebijakan untuk mengurangi kemiskinan harus berfokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Sen, 1999).

Teori siklus kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*) , seperti yang diuraikan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam kajian Kuncoro (2004), menyatakan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari kondisi kemiskinan yang telah ada sebelumnya.

Teori ini mengemukakan bahwa kemiskinan di suatu negara bersifat sirkular tanpa titik awal atau akhir, menyebabkan negara miskin tetap terperangkap dalam kemiskinan karena ketidakmampuan mengatasi keterbatasan yang ada, yang selanjutnya memperburuk kondisi kemiskinan (Averina & Widagda, 2024).

Teori Kesejahteraan pada *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk (Sukmana, 2017).

Menurut Karl Marx, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kekurangan materi, tetapi juga sebagai hasil dari struktur sosial ekonomi yang mendominasi dalam masyarakat. Marx menilai bahwa struktur ekonomi kapitalis menjadi akar utama kemiskinan. Di Indonesia, dapat dilihat bagaimana sejumlah kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu atau kelompok. Kondisi ini menciptakan jurang ekonomi yang lebar antara pemilik modal dan pekerja, yang merupakan akar dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan.

Pokok dalam teori Marx adalah konsep eksploitasi pekerja dan surplus nilai. Pemilik modal dalam sistem kapitalis cenderung mengeksploitasi pekerja dengan memaksimalkan surplus nilai, yaitu perbedaan antara nilai yang dihasilkan oleh pekerja dan nilai upah yang mereka terima. Di Indonesia, hal ini sering terlihat dalam kondisi kerja di berbagai sektor. Upah pekerja sering tidak sebanding dengan dengan nilai ekonomi yang mereka hasilkan, yang menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di kalangan pekerja. Konsep keterasingan (*alienasi*) dalam teori Karl Marx perasaan terasing yang dialami pekerja terhadap hasil kerja mereka dan keputusan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks kemiskinan di Indonesia, keterasingan ini dapat dilihat dalam rendahnya tingkat kepuasan kerja, kurangnya motivasi, dan rasa tidak memiliki kendali atas nasib ekonomi mereka. Penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat keterasingan yang tinggi bisa menjadi faktor penyebab masalah psikologis dan rendahnya kesejahteraan mental di kalangan pekerja. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga berdampak buruk pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja secara umum. Marx membagi masyarakat menjadi dua kelas utama: kapitalis (pemilik modal) dan proletariat (pekerja). Pandangan kelas sosial ini sangat relevan dalam konteks kemiskinan di Indonesia. Distribusi kekayaan yang tidak merata antara kelas-kelas sosial kini menjadi pemicu ketidaksetaraan dan kemiskinan (Daniel & Bahari, 2024).

Berdasarkan latar belakang di muka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, proporsi pekerja informal, upah minimum regional, proporsi PDRB sektor pertanian, kepadatan penduduk, dan akses layanan dasar terhadap kemiskinan di 15 provinsi di Indonesia periode 2015-2023.

2. Tinjauan Pustaka

Di Jawa Barat, selama periode 2016 - 2020, dengan menggunakan metode Data Panel dengan model terpilih *Random Effect Model* (REM) Putri et al. (2022), menemukan bahwa kepadatan penduduk dan sanitasi layak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi -0,341 dan -0,319 serta signifikansi empirik t sebesar 0,0424 ($< 0,05$) dan 0,0000 ($< 0,01$).

Fandika et al. (2024), selama periode 2016-2022, di Sumatera Utara dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi -0,777 dengan signifikansi empirik t 0,025 ($< 0,05$). Selama periode 2013-2019, di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), Sholikah et al. (2022) menemukan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi -0,343 dengan signifikansi empirik t 0,000 ($< 0,01$). Pengeluaran pemerintah ditemukan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi 4,56 dengan signifikansi empirik t 0,309 ($> 0,10$).

Lavenia et al. (2023), selama periode 2015-2021, di Jawa Barat dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan bahwa upah minimum memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi -4,716 dengan signifikansi empirik t 0,017 ($< 0,05$). Maulana (2022), selama periode 2017-2021, di Indonesia Bagian Timur dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan bahwa tenaga kerja informal berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi -1,01 dengan signifikansi empirik t 0,286 ($< 0,05$).

Di Indonesia Bagian Barat, selama periode 2016-2020, dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), Maulidina et al. (2020) menemukan bahwa PDRB sektor pertanian berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi 4,3614 dengan signifikansi empirik t 0,0237 ($< 0,05$). Selama periode 2005-2020, di Kabupaten Sragen dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), Amalia & Utomo (2023) menemukan bahwa variabel upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien regresi -7,685073 dan signifikansi empirik t 0,0000 ($< 0,01$).

Farrastia & Srinita (2024), selama periode 1991-2022, di Provinsi Aceh, dengan menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), menemukan bahwa dalam jangka pendek variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selama periode 2005-2022, di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), Ayuningtyas & Imaningsih (2024) menemukan bahwa variabel upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien regresi -0,00001530 dan signifikansi empirik t 0,000 ($< 0,01$).

Feriyanto et al. (2020), selama periode 2010-2019, di Provinsi-Provinsi Indonesia dengan menggunakan analisis data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan signifikansi empirik t 0,4780 ($> 0,1$). Dewi (2022), selama periode 2013-2021, di Pulau Jawa dengan menggunakan analisis data panel dengan model estimasi terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien

regresi -0,7782 signifikansi empirik t 0,0709 ($< 0,10$), variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi 2,2569 signifikansi empirik t 0,0090 ($< 0,01$). Upah Minimum Regional tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan signifikansi empirik t 0,1532 ($> 0,10$).

Pramesti & Utomo (2023), selama periode 2015-2020, di Sumatra Utara dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terestimasi terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan bahwa Upah Minimum memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar -18,05710 dan signifikansi empirik t 0,0000. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Selama periode 2013-2021, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terpilih *Random Effect Model* (REM), Qurrotu'aini & Purbadharmaja (2023) menemukan bahwa Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi -1,91 dan signifikansi empirik 0,939 ($> 0,10$).

Angraeni et al. (2024), selama periode 2019-2023, di Indonesia dengan menggunakan analisis regresi data panel model terestimasi terbaik *Random Effect Model* (REM), menemukan bahwa upah minimum memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi -0,100419 dan signifikansi empirik t 0,0004 ($< 0,05$). Isnowati et al. (2023), selama periode 2018-2020, di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terestimasi terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan bahwa belanja pemerintah untuk pendidikan, belanja pemerintah untuk kesehatan, dan belanja pemerintah untuk infrastruktur memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan masing-masing koefisien regresi -0,3140, -0,0672, -0,0398.

3. Metode Penelitian

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 GOV_{it} + \beta_2 EMP_{it} + \beta_3 UMR_{it} + \beta_4 PDRBP_{it} + \beta_5 KP_{it} + \beta_6 BSA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

POV = Kemiskinan (%)

GOV = Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)

$EMPI$ = Proporsi Pekerja Sektor Informal (%)

UMR = Upah Minimum Regional (Rupiah)

$PDRBP$ = Proporsi PDRB Sektor Pertanian (%)

KP = Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)

BSA = *Basic Service Access* (Akses terhadap layanan dasar) (%)

ε = *Error Term* (faktor kesalahan)

β_0 = Konstanta

$\beta_1... \beta_6$ = Koefisien regresi variabel independen

i = Observasi (Provinsi)

t = Tahun ke t

Model ekonometrik di atas merupakan kombinasi dari beberapa model. Variabel pengeluaran pemerintah diambil dari model Fandika et al. (2024), variabel tenaga kerja informal diambil dari model Maulana (2022), variabel upah minimum diambil

dari model Angraeni et al. (2024), variabel PDRB sektor pertanian diambil dari model Maulidina et al. (2020), variabel kepadatan penduduk diambil dari model Putri et al. (2022), dan untuk memperkaya variabel penelitian maka ditambahkan variabel akses terhadap layanan dasar karena faktor ini sangat penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah, Upah Minimum Regional, Proporsi PDRB Sektor Pertanian, dan Akses Terhadap Layanan Dasar diduga memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan Proporsi Pekerja Sektor Informal dan Kepadatan Penduduk diduga memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data panel yaitu kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* dari tahun 2015-2023, sedangkan data *cross section* yang digunakan adalah 15 provinsi di Indonesia. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tahap estimasi analisis regresi data panel meliputi estimasi parameter model ekonometrik dengan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM); pemilihan model terestimasi terbaik dengan Uji Chow dan Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier jika diperlukan; Uji kebaikan model pada model terestimasi terpilih; dan uji validitas pengaruh variabel independen pada model terestimasi terpilih.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil estimasi model ekonometrik di muka dengan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - Cross section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
<i>C</i>	32,3588	29,5645	31,2691
<i>logGOV</i>	1,7570	0,8474	1,0051
<i>EMPI</i>	0,2819	0,0851	0,1025
<i>logUMR</i>	-2,0536	-1,4722	-1,3472
<i>PDRBP</i>	-0,0239	0,1497	0,0960
<i>logKP</i>	-1,8995	-1,6745	-2,6034
<i>BSA</i>	-0,0761	-0,0156	-0,0202
<i>R</i> ²	0,7934	0,9940	0,4587
<i>Adjusted. R</i> ²	0,7783	0,9923	0,4191
Statistik <i>F</i>	52,5057	571,7218	11,5826
Prob. Statistik <i>F</i>	0,0000	0,0000	0,0000
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow			
Cross- Section $F(16,68) = 164,8295$; Prob. $F(16,68) = 0,0000$			
(2) Hausman			
Cross-Section random $\chi^2(6) = 10,4393$; Prob. $\chi^2 = 0,1073$			

Sumber: BPS, diolah.

Dari Tabel 1, hasil uji Chow menunjukkan nilai *p* (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* sebesar 0,0000 (< 0,01), dari hasil tersebut maka model terestimasi yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Sedangkan hasil dari uji Hausman menunjukkan nilai *p* (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik

statistik χ^2 sebesar 0,1073 ($> 0,10$) yang berarti model terestimasi yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM).

Dari uji Chow dan uji Hausman di muka, model *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model *Random Effect Model* (REM) terlihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2

Model Estimasi *Random Effect Model* (REM)

\widehat{POV}_{it}	=	31,2691	+ 1,0051logGOV _{it}	+ 0,1025EMPI _{it}	-
			1,3472 logUMR _{it}		
		(0,0056)*	(0,0008)*	(0,0609)***	
			+ 0,0960PDRBP _{it}	- 2,6034logKP _{it}	- 0,0202BSA _{it}
		(0,0416)**	(0,0000)*	(0,0277)**	
$R^2 = 0,4587; DW = 1,4370; F = 11,5826; Prob. F = 0,0000$					

Sumber: BPS, diolah. **Keterangan:** *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Tabel 3

Efek dan Konstanta Wilayah

No	Wilayah	Efek	Konstanta
1.	Aceh	-0,1228	31,1463
2.	Sumatera Selatan	-1,4041	29,865
3.	Bengkulu	0,0945	31,3636
4.	Lampung	-0,9760	30,2931
5.	Jawa Tengah	2,8343	34,1034
6.	Nusa Tenggara Barat	1,3958	32,6649
7.	Nusa Tenggara Timur	3,6704	34,9395
8.	Sulawesi Tengah	-3,5348	27,7343
9.	Sulawesi Selatan	-3,3030	27,9661
10.	Sulawesi Tenggara	-3,2004	28,0687
11.	Gorontalo	1,0662	32,3353
12.	Sulawesi Barat	-4,8397	26,4294
13.	Maluku	0,5807	31,8498
14.	Papua Barat	1,7678	33,0369
15.	Papua	5,9710	37,2401

Sumber: BPS, diolah

Dari Tabel 2 terlihat model terestimasi *REM* eksis dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* bernilai 0,0000 ($< 0,01$), dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,4587; yang menunjukkan model terestimasi *REM* memiliki daya ramal sedang. Semua variabel independen, yakni variabel Pengeluaran Pemerintah (*GOV*), Proporsi Pekerja Sektor Informal (*EMPI*), Upah Minimum Regional (*UMR*), Proporsi PDRB Sektor Pertanian (*PDRBP*), Kepadatan Penduduk (*KP*), dan *Basic Service Access* (*BSA*), semuanya memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (*POV*) dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik *t* masing-masing sebesar 0,0056 ($< 0,01$); 0,0008 ($< 0,01$); 0,0609 ($< 0,10$); 0,0416 ($< 0,05$); 0,0000 ($< 0,01$) dan 0,0277 ($< 0,05$).

Variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,0051, dengan pola hubungan linier-logaritma. Artinya, apabila Pengeluaran

Pemerintah naik 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan naik sebesar $1,0051 : 100 = 0,0100$ persen. Sebaliknya apabila Pengeluaran Pemerintah turun 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan turun sebesar $0,0100$ persen. Variabel Proporsi Pekerja Sektor Informal memiliki nilai koefisien regresi sebesar $0,1025$, dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila Proporsi Pekerja Sektor Informal naik 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan naik sebesar $0,1025$ persen. Sebaliknya, apabila Proporsi Pekerja Sektor Informal mengalami turun 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan turun sebesar $0,1025$ persen.

Variabel Upah Minimum Regional memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-1,3472$, dengan pola hubungan linier-logaritma. Artinya, apabila Upah Minimum Regional naik 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan turun sebesar $-1,3472 : 100 = -0,013472$ persen. Sebaliknya, apabila Upah Minimum Regional turun 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan naik sebesar $0,013472$ persen. Variabel Proporsi PDRB Sektor Pertanian memiliki nilai koefisien regresi sebesar $0,0960$, dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila Proporsi PDRB Sektor Pertanian naik 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan naik sebesar $0,0960$ persen. Sebaliknya, apabila Proporsi PDRB Sektor Pertanian turun 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan turun sebesar $0,0960$ persen.

Variabel Kepadatan Penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-2,6034$, dengan pola hubungan linier-logaritma. Artinya, apabila Kepadatan Penduduk naik 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan turun sebesar $-2,6034 : 100 = -0,026034$ persen. Sebaliknya, apabila Kepadatan Penduduk turun 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan naik sebesar $0,026034$ persen. Variabel Akses terhadap layanan dasar memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-0,0202$, dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila Akses terhadap layanan dasar naik 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan turun sebesar $0,0202$ persen. Sebaliknya, apabila Akses terhadap layanan dasar turun 1 persen, maka Tingkat Kemiskinan akan naik sebesar $0,0202$ persen.

Nilai konstanta masing-masing Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai konstanta tertinggi dimiliki oleh Provinsi Papua, yaitu sebesar $37,2401$. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Pengeluaran pemerintah, Upah Minimum Regional, Proporsi PDRB Sektor Pertanian, dan Akses Terhadap Layanan Dasar di Provinsi Papua cenderung memiliki Tingkat Kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Setelah Provinsi Papua, tiga provinsi dengan konstanta tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Papua Barat.

Nilai konstanta terendah dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar $26,4294$. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Pengeluaran pemerintah, Upah Minimum Regional, Proporsi PDRB Sektor Pertanian, dan Akses Terhadap Layanan Dasar di Provinsi Sulawesi Barat cenderung memiliki Tingkat Kemiskinan cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Setelah Provinsi Sulawesi Barat, tiga provinsi dengan konstanta terendah adalah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perbedaan konstanta antar wilayah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3 mencerminkan adanya efek individual yang bersifat spesifik wilayah dalam model *Random Effect Model* (REM). Nilai konstanta yang bervariasi menunjukkan bahwa setiap provinsi memiliki karakteristik unik yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, seperti Pengeluaran Pemerintah, Proporsi

Pekerja Sektor Informal, Upah Minimum Regional, dan lainnya. Karakteristik ini mencakup faktor-faktor tak terukur seperti kondisi geografis, efektivitas program penanggulangan kemiskinan, hingga akses terhadap layanan dasar.

Tingkat Kemiskinan di 15 Provinsi di Indonesia selama periode tahun 2015-2023 dipengaruhi oleh variabel Pengeluaran Pemerintah (*GOV*), Proporsi Pekerja Sektor Informal (*EMPI*), Upah Minimum Regional (*UMR*), Proporsi PDRB Sektor Pertanian (*PDRBP*), Kepadatan Penduduk (*KP*), dan *Basic Service Access (BSA)*.

Interpretasi Ekonomi

Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif, menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah belum efektif menurunkan Tingkat Kemiskinan. Hal ini memperlihatkan bahwa Pengeluaran Pemerintah ternyata dapat memicu meningkatnya kemiskinan dikarenakan pengeluaran pemerintah yang besar namun tidak efisien atau salah sasaran. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina & Usman (2020), variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Papua artinya semakin tinggi angka pengeluaran pemerintah maka tidak akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Papua.

Variabel Proporsi Pekerja Sektor Informal memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Peningkatan jumlah pekerja sektor informal cenderung menyebabkan kenaikan angka kemiskinan karena sektor ini memiliki karakteristik yang kurang menguntungkan bagi pekerja, seperti upah yang rendah, jam kerja yang tidak pasti, dan kurangnya perlindungan sosial. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meimela (2019) yang menunjukkan bahwa persentase pekerja informal memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Semakin tinggi persentase pekerja informal maka kemiskinan akan semakin kecil.

Variabel Upah Minimum Regional berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, ketika upah minimum naik maka kemiskinan akan turun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manullang et al. (2024) yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Secara teoritis, semakin tinggi UMR yang ditetapkan, semakin besar pendapatan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penghasilan lebih dari UMR dapat mengurangi risiko terjadinya kemiskinan.

Variabel Proporsi PDRB Sektor Pertanian berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Kenaikan proporsi PDRB sektor pertanian yang berpengaruh pada peningkatan kemiskinan, dapat terjadi karena kenaikan PDRB tanpa adanya peningkatan pendapatan petani secara signifikan. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferian & Gunanto (2021) berdasarkan hasil regresi, menunjukkan bahwa *agrishare* memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah penduduk miskin 29 kabupaten di Jawa Tengah. Hubungan yang positif antara sektor pertanian dengan kemiskinan ini disebabkan karena pendapatan di sektor pertanian cenderung lebih sedikit dibanding sektor lain. Penelitian yang dilakukan oleh Takaredas et al. (2024) juga menunjukkan bahwa Sektor Pertanian berkontribusi secara signifikan dan positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Restiatun et al. (2023) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan sektor pertanian memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia.

Variabel Kepadatan Penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, apabila kepadatan penduduk naik maka kemiskinan akan turun. Kepadatan

penduduk yang tinggi dapat mendorong aglomerasi ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja sehingga mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Putri et al. (2022) ditemukan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Jawa Barat.

Variabel *Basic Service Access* (Akses terhadap layanan dasar) memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di 15 provinsi di Indonesia. Artinya, ketika masyarakat memiliki akses yang memadai ke kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi, mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

5. Simpulan Dan Saran

Tingkat kemiskinan di 15 provinsi di Indonesia selama periode 2015-2023 dipengaruhi secara positif oleh Pengeluaran Pemerintah, Proporsi Pekerja Sektor Informal, Proporsi PDRB Sektor Pertanian dan secara negatif dipengaruhi oleh Upah Minimum Regional, Kepadatan Penduduk, dan Basic Service Access (Akses terhadap layanan dasar). Pengeluaran Pemerintah, dengan demikian, belum efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini memperlihatkan bahwa Pengeluaran Pemerintah ternyata dapat memicu meningkatnya kemiskinan dikarenakan pengeluaran pemerintah yang besar namun tidak efisien atau salah sasaran. Proporsi Pekerja Sektor Informal berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Upah Minimum Regional berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya upah minimum efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan, semakin besar pendapatan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kemiskinan.

Proporsi PDRB Sektor Pertanian berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hubungan yang positif antara sektor pertanian dengan kemiskinan ini disebabkan karena pendapatan di sektor pertanian cenderung lebih sedikit dibanding sektor lain. Kepadatan Penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Basic Service Access (Akses terhadap layanan dasar) memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Ketika masyarakat memiliki akses layanan dasar yang memadai, mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup meningkatkan produktivitas ekonomi, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel baru yang relevan. Selain itu, penelitian dengan topik ini dapat dilakukan di wilayah yang berbeda, sehingga bisa didapatkan kesimpulan yang lebih kuat terkait faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan.

6. Daftar Pustaka

- Amalia, M. B., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sragen Tahun 2005-2020. *Pareto: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1).
- Anggraini, D., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jambura : Economic Education Journal*, 4(1), 87-96. <https://doi.org/10.37479/jeej.v4i1.11198>
- Angraeni, R. V., Nurjanah, S., & Nikensari, S. I. (2024). The Effect of Inflation, Minimum Wage, Labor Absorption and the Covid-19 Pandemic on Poverty in Indonesia.

- International Journal of Management Finance*, 1(4), 43–48.
<https://doi.org/10.62017/finance.v1i4.47>
- Averina, R. Y., & Widagda, I. G. N. J. A. (2024). Pengaruh Kontribusi Sektor Pertanian, IPM, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 8(2), 635–637.
- Ayuningtyas, A. D., & Imaningsih, N. (2024). The Influence of Economic Growth, Dependency Ratio, Education Level, and Minimum Wage on Poverty Levels in Kebumen Regency. *Journal of Business Management and Economic Development*, 2(03), 1078–1090. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v2i03.857>
- Chairunnisa, N. M., & Qintharah, Y. N. (2022). Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 147–161. <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530>
- Chinthya, N., Imansyah, M. H., & Rahayu, D. (2022). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tengah. *Correspondencias & Análisis*, 7(15018), 1–23. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13233>
- Daniel, D., & Bahari, Y. (2024). Masalah Sosial Kemiskinan di Indonesia: Suatu Pandangan Teoritis Karl Marx. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i1.19432>
- Dewi, D. C. N. T. (2022). Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kemiskinan Pulau Jawa Periode 2013-2021. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(1), 132–145. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i1.10719>
- Farrastia, F., & Srinita, S. (2024). The Influence Of Government Expenditure, Population Growth, Inflation, and Unemployment on Poverty in Aceh Province. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*, 9(1), 36–46.
- Ferian, D. D., & Gunanto, E. Y. A. (2021). Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan dan Bagaimana Penanggulangannya: Studi Empiris Pada 29 Kabupaten di Jawa Tengah 2014-2020. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 172–193. <https://media.neliti.com/media/publications/455468-none-8a1a4a8a.pdf>
- Feriyanto, N., El Aiyubbi, D., & Nurdany, A. (2020). The Impact of Unemployment, Minimum Wage, and Real Gross Regional Product on Poverty Reduction in Provinces of Indonesia. In *Asian Economic and Financial Review* (Vol. 10, Issue 10, pp. 1088–1099). Asian Economic and Social Society. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099>
- Isnawati, S., Masdjojo, G. N., & Prabowo, R. E. (2023). Government Expenditure and Poverty. *Riset Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 205–215. <https://doi.org/10.31002/rep.v8i2.1003>
- Lavenia, L., Mandai, S., & Muhammad Yudhi Lutfi. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk, dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 319–328. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15412>
- Maulidina, S., Zahra, V. M., & Sutjipto, H. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Pada Sektor Pertanian di Indonesia Bagian Barat. *Prosiding The 2nd National Conference on Applied Business, Education, & Technology*, 257–269.

- Manullang, A., Pasaribu, R., Nabillah, R., Maipita, I., & Rinaldi, M. (2024). *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara*. 1(2), 764–772.
- Marlina, M., & Usman, U. (2020). Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Terhadap Kemiskinan Di Papua. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 15. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3202>
- Meimela, A. (2019). Model Pengaruh Tingkat Setengah Pengangguran, Pekerja Informal Dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2017. *Jiep*, 19(1), 7–13. chrome-extension://gphandlahdpffmccakmbngmbjnjiiahp/
<https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/download/25518/23450>
- Nurias, N., Johari, S. M., Muljarijadi, B., & Wardhana, A. (2023). Reducing the provincial poverty rate in Indonesia: The impact of local government expenditure. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 297–315. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.18618>
- Pramesti, F. D., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2015-2020. *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(2), 240–250.
- Putri, S., Azizah, N., Sumarni Pratiwi, L., Amaliah, I., & Fitriyana, F. (2022). Sanitasi dan Kepadatan Penduduk Sebagai Dinamika Kemiskinan Kota: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 55–70.
- Qurrotu'aini, L., & Purbadharmaja, I. B. P. (2023). The Effect of Minimum Wage and Per Capita Expenditure on Poverty in. *Syntax Admiration*, 4(9), 1518–1528.
- Restiatun, R., Udi, K., & Rosyadi, R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian, Jumlah Pekerja Sektor Pertanian Dan Nilai Tukar Petani Terhadap Tingkat Kemiskinan Perdesaan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 42–53. <https://doi.org/10.23960/jep.v12i1.977>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*.
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Sholikah, N. M., Priyono, T. H., & Yunitasari, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(2), 259–273. <https://doi.org/10.35760/eb.2022.v27i2.4149>
- Takaredas, R., Baruwadi, M., & Akib, F. H. Y. (2024). Hubungan Antara Kontribusi Sektor Pertanian Pada Pdrb Dengan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 147–154. <https://doi.org/10.37905/jsep.v1i3.23845>